

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 59 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENYALURAN
SERTA PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96, Pasal 97 dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka guna pedoman penetapan alokasi dan besaran, penyaluran dan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pekalongan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penyaluran Serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 57);
14. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 59);
15. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENYALURAN SERTA PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Desa.
9. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa non Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa lainnya.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

12. Pengalokasian ADD adalah besaran ADD yang diterima oleh Desa.
13. Penyaluran ADD adalah proses pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah yang disingkat RKUD ke Rekening Kas Desa yang disingkat RKD.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
15. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
16. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
17. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
18. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
20. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
21. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
22. RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pekalongan.
23. Rekening Kas Desa yang disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang PemerintahanDesa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untukmembayar seluruh pengeluaran Desa.

24. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
26. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
28. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
29. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
30. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
31. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat daerah kabupaten Pekalongan.

BAB II PENGELOLAAN ADD

Pasal 2

ADD dianggarkan dalam APBD setiap tahun.

Pasal 3

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 4

ADD dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

BAB III PRINSIP PENGGUNAAN ADD

Pasal 5

ADD dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa.

Pasal 6

ADD digunakan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 7

Penggunaan ADD tertuang dalam APBDesa yang mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa.

Pasal 8

Penetapan Rincian Besaran ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Penggunaan ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa Non PNS, Sekretaris Desa Non PNS dan Perangkat Desa Non PNS; dan
 - b. diberikan dengan alokasi besaran sebagai berikut:
 1. Kepala Desa paling sedikit Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh perseratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
 2. Sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh perseratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
 3. Perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus perseratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
 4. Besaran persentase 120% (seratus dua puluh perseratus), 110% (seratus sepuluh perseratus), dan 100% (seratus perseratus) sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (2) Selain untuk penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaan ADD diprioritaskan untuk:
 - a. Premi asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebesar 9,24% (sembilan koma dua puluh empat perseratus) terdiri dari 6,24% (enam koma dua puluh empat perseratus) dibayarkan oleh Pemerintah desa dan 3% (tiga perseratus) dari Penghasilan tetap dibayar oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Premi asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebesar 5% (lima perseratus) terdiri dari 4% (empat perseratus) dibayarkan oleh Pemerintah desa, dan 1% (satu perseratus) dari Penghasilan tetap dibayar oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- c. Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa;
 - d. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
 - e. Operasional Pemerintah Desa;
 - f. Tunjangan BPD;
 - g. Operasional BPD;
 - h. Peningkatan Kapasitas BPD;
 - i. Honorarium tenaga profesional tertentu; dan
 - j. Operasional Kelembagaan Desa.
- (3) Besaran tunjangan Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tunjangan Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa paling banyak sebesar Rp1. 673.360,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
 - b. Tunjangan Kepala Desa yang berstatus PNS diberikan setara dengan TPP Lurah;
 - c. Tunjangan Sekretaris Desa paling banyak sebesar Rp700.580,00 (tujuh ratus ribu lima ratus delapan puluh rupiah); dan
 - d. Tunjangan Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling banyak sebesar Rp112.800,00 (seratus dua belas ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf f, dengan mengecualikan dari ketentuan Pasal 61 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tunjangan Ketua paling banyak sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - b. Tunjangan Wakil Ketua paling banyak sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - c. Tunjangan Sekretaris paling banyak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
 - d. Tunjangan Ketua Bidang paling banyak sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- (5) Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), dilaksanakan secara non tunai.
- (6) Pemerintah Desa dapat menggunakan di luar prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan kewenangan Desa apabila semua prioritas tersebut telah terpenuhi.

BAB IV PENYALURAN DAN PELAKSANAAN ADD

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD dilakukan sesuai dengan pedoman teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyaluran dan pencairan ADD dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa yang anggarannya bersumber dari ADD berpedoman pada pedoman teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (3) Pengelolaan ADD dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan APBDesa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Guna tertib administrasi pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian ADD dibentuk Pengelola ADD.

- (2) Pengelola ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten;
 - b. Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan; dan
 - c. Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa.
- (3) Pembentukan Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pembentukan Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan dalam Keputusan Camat.
- (5) Pembentukan Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

BAB V LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan ADD setiap 3 (tiga) bulan kepada Camat selaku Ketua Tim fasilitasi ADD tingkat Kecamatan dengan melampirkan surat pertanggungjawaban.
- (2) Camat menyampaikan rekapitulasi laporan realisasi pelaksanaan kegiatan ADD setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui Ketua Tim fasilitasi ADD tingkat Kabupaten dengan tembusan Kepala BPKD Kabupaten Pekalongan.
- (3) Penyampaian rekapitulasi laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan berikutnya.

Pasal 14

Dalam hal kepala Desa tidak dan/atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), maka penyaluran ADD tahap berikutnya ditunda sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan ADD tahap sebelumnya.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan yang anggarannya bersumber dari ADD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi Desa; dan
 - b. Camat setempat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP); dan
 - b. Camat setempat.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di KAJEN
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI PEKALONGAN,
ttd
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di KAJEN
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2019 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



MOCH. ARIFIN, SH.,MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690205 199903 1 005

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 59 TAHUN 2019 TENTANG
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN,
PENETAPAN RINCIAN DAN
PENYALURAN SERTA PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2020.

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

	Halaman
I. KEBIJAKAN UMUM ADD TAHUN ANGGARAN 2020	
A. Pengelola Alokasi Dana Desa	2
B. Mekanisme Pengajuan Alokasi Dana Desa	3
C. Mekanisme Pencairan Alokasi Dana Desa	4
D. Pengenaan Pajak pada Pelaksanaan Alokasi Dana Desa	4
E. Pelaporan dan Pertanggungjawaban	8
F. Pengawasan Alokasi Dana Desa	9
G. Penutup	9
II. CONTOH FORMAT DOKUMEN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA	
A. FORMAT PERMOHONAN PENYALURAN	10
B. FORMAT REKOMENDASI PENYALURAN	11
C. FORMAT REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ADD	12
III. RINCIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020	13

I. KEBIJAKAN UMUM ADD TAHUN ANGGARAN 2020.

A. PENGELOLA ALOKASI DANA DESA

Pengelola ADD terdiri dari:

1. Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten.

Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati berjumlah ganjil dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Penasehat : Bupati.
- b. Wakil Penasehat : Wakil Bupati.
- c. Pengarah : Sekretaris Daerah.
- d. Wakil Pengarah : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda.
- e. Ketua : Kepala Dinas PMD, P3A dan PPKB.
- f. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas PMD, P3A dan PPKB.
- g. Sekretaris : Kepala Bidang Administrasi dan Penataan Pemerintahan Desa Dinas PMD, P3A dan PPKB.
- h. Anggota : Perangkat Daerah terkait, meliputi:
 - 1) Inspektorat;
 - 2) BAPPEDA LITBANG;
 - 3) BPKD;
 - 4) Bagian Hukum Setda;
 - 5) Dinas PMD, P3A dan PPKB.

2. Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan.

Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat berjumlah ganjil dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Ketua : Camat.
- b. Wakil Ketua : Sekretaris Kecamatan.
- c. Sekretaris : Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Umum.
- d. Anggota : Paling banyak 4 (empat) orang.

3. Tim Pelaksana Tingkat Desa.

Tim Pelaksana Kegiatan ADD Tingkat Desa adalah bagian dari pelaksanaan APBDesa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, berlaku sejak awal tahun anggaran, terdiri dari:

- a. Kepala Desa : selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).
- b. Sekretaris Desa : selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).
- c. Kasi / Kaur : selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) sesuai dengan bidangnya.
- d. Kaur Keuangan : menjalankan fungsi Kebendaharaan.

4. Tim Pengelola Kegiatan (TPK)/Pengadaan Barang/Jasa.

Tim Pengelola Kegiatan (TPK)/Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berjumlah ganjil minimal 3 (tiga) orang, dengan susunan sebagai berikut:

- a. Ketua : berasal dari unsur Perangkat Desa.

- b. Sekretaris : dapat berasal dari unsur Perangkat Desa Kewilayahan/Lembaga Kemasyarakatan.
- c. Anggota : dapat berasal dari unsur Perangkat Desa Kewilayahan/Lembaga Kemasyarakatan.

B. MEKANISME PENGAJUAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA.

Mekanisme pengajuan penyaluran ADD Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan secara bertahap setiap tiga bulan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tingkat Desa:

Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati cq. Kepala Dinas PMD, P3A dan PPKB melalui Camat setempat, dengan dilampiri :

Tahap I

- a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang telah ditetapkan dan dicetak menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
- b. Surat Bukti Penerimaan (A2) yang ditandatangani Kepala Desa lembar asli bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- c. Foto copy Buku Rekening Kas Desa atas nama Desa pada Bank Pemerintah dan menunjukkan asli Buku Rekening Desa;
- d. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa untuk 1 (satu) Tahun Anggaran;
- e. Laporan Realisasi dan surat pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap IV Tahun 2019 ; dan
- f. Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa) Tahun 2020.

Tahap II

- a. Surat Bukti Penerimaan (A2) yang ditandatangani Kepala Desa lembar asli bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- b. Foto copy Buku Rekening Kas Desa atas nama Desa pada Bank Pemerintah dan menunjukkan asli Buku Rekening Desa;
- c. laporan realisasi dilengkapi surat pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahap I; dan
- d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun Anggaran sebelumnya.

Tahap III

- a. Surat Bukti Penerimaan (A2) yang ditandatangani Kepala Desa lembar asli bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- b. Foto copy Buku Rekening Kas Desa atas nama Desa pada Bank Pemerintah dan menunjukkan asli Buku Rekening Desa; dan
- c. laporan realisasi dilengkapi surat pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahap II.

Tahap IV

- a. Surat Bukti Penerimaan (A2) yang ditandatangani Kepala Desa lembar asli bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - b. Foto copy Buku Rekening Kas Desa atas nama Desa pada Bank Pemerintah dan menunjukkan asli Buku Rekening Desa; dan
 - c. laporan realisasi dilengkapi surat pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahap III.
2. Tingkat Kecamatan:
- a. Memberi rekomendasi permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa sesuai tahapan, dengan cara:
 - 1) memastikan bahwa kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa sudah tercantum dalam Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2020;
 - 2) mengecek kelengkapan persyaratan pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa; dan
 - b. meneruskan permohonan penyaluran kepada Bupati Cq. Kepala Dinas PMD, P3A dan PPKB setelah persyaratan lengkap dan sesuai ketentuan tahapan penyaluran Alokasi Dana Desa.
3. Tingkat Kabupaten:
- a. Dinas PMD,P3A dan PPKB mengajukan permohonan persetujuan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati berdasarkan permohonan Kepala Desa yang telah direkomendasi oleh Camat; dan
 - b. berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, BPKD melakukan penyaluran ADD dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

C. MEKANISME PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA.

Pencairan ADD dari Rekening Kas Desa dilakukan dengan cara :

1. pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk diverifikasi oleh Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD, dan disetujui oleh Kepala Desa; dan
2. Kepala Desa mengajukan permohonan Pencairan ke Rekening Kas Desa di Bank Pemerintah, dengan tembusan kepada Camat.

D. PENGENAAN PAJAK PADA PELAKSANAAN KEGIATAN ALOKASI DANA DESA.

1. Kewajiban perpajakan Bendahara Desa atas penggunaan dana APBDesa adalah melakukan pemotongan/pemungutan pajak, penyetoran pajak ke kas negara serta pelaporan pajak menggunakan SPT Masa setiap bulannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
2. Tata Cara Pemotongan/Pemungutan Pajak.
 - a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pada prinsipnya semua barang dan jasa dikenakan PPN kecuali yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bendahara Desa mengenakan PPN apabila pembayaran atas pengadaan/pembelian barang/jasa yang nilainya melebihi

Rp1.000.000,00 (nilai termasuk PPN terutang), baik kepada penyedia barang/jasa yang Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun kepada penyedia barang/jasa Bukan PKP. Salah satu ciri dari penyedia barang/jasa PKP adalah penyedia barang/jasa tersebut membuat Faktur Pajak.

Rumus menghitung PPN = Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x tarif

- 1) Penyedia barang/jasa PKP = $(100/110 \times \text{Nilai Pembayaran}) \times 10\%$; dan
- 2) Penyedia barang/jasa Bukan PKP = $\text{Nilai Pembayaran} \times 10\%$.

b. PPh Pasal 22

Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang yang nilainya melebihi Rp2.000.000,00, selain dikenakan PPN sebesar 10% (sepuluh perseratus), maka Bendahara Desa juga mengenakan PPh Pasal 22 atas pembayaran tersebut. Besarnya tarif PPh Pasal 22 adalah 1,5%, (satu koma lima perseratus) apabila penyedia barang mempunyai NPWP. Apabila penyedia barang tidak mempunyai NPWP ataupun tidak memberikan NPWP maka tarif PPh Pasal 22 adalah 3% (tiga perseratus).

Rumus menghitung PPh Pasal 22 adalah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x tarif, dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Penyedia barang/jasa PKP = $(100/110 \times \text{Nilai Pembayaran}) \times 1,5\%$;
- 2) Penyedia barang/jasa Bukan PKP ber-NPWP = $\text{Nilai Pembayaran} \times 1,5\%$; dan
- 3) Penyedia barang/jasa Bukan PKP tidak ber-NPWP = $\text{Nilai Pembayaran} \times 3\%$.

Apabila Penyedia barang/jasa memberikan dokumen berupa Fotokopi Surat Keterangan Bebas (SKB) yang telah dilegalisir oleh KPP, maka Bendahara Desa tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22.

c. PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

Pembayaran berupa honorarium, uang lembur, uang transport atau penghasilan dengan nama apapun dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar 5% (lima perseratus) tanpa PTKP bagi yang memiliki NPWP, sedangkan yang tidak memiliki NPWP dikenakan sebesar 6% (enam perseratus) tanpa PTKP.

Pembayaran berupa penghasilan tetap yang rutin dibayarkan setiap bulan, penghitungan pajaknya menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

d. PPh Pasal 23

Pembayaran kepada penyedia barang/jasa berkaitan dengan jasa dan sewa perlengkapan/peralatan dikenakan PPh Pasal 23.

Rumus menghitung PPh Pasal 23 adalah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x tarif , dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Penyedia barang/jasa PKP = $(100/110 \times \text{Nilai Pembayaran}) \times 2\%$;
- 2) Penyedia barang/jasa Bukan PKP ber-NPWP = Nilai Pembayaran x 2%; dan
- 3) Penyedia barang/jasa Bukan PKP tidak ber-NPWP = Nilai Pembayaran x 4%.

Apabila pembayarannya melebihi Rp1.000.000,00, maka Bendahara Desa juga mengenakan PPN sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Apabila Bendahara Desa memperoleh Fotokopi Surat Keterangan Bebas (SKB) yang telah dilegalisir oleh KPP dari penyedia barang/jasa, maka Bendahara Desa tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 23.

e. PPh Final Pasal 4 ayat (2)

Pembayaran berkaitan dengan sewa tanah dan atau bangunan dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2) dengan tarif 10 % (sepuluh persen) dari nilai pembayaran.

3. Tata Cara Penyetoran Pajak.

- a. Batas waktu Penyetoran PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Final Pasal 4 ayat (2) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah masa pajak berakhir. Surat Setoran Pajaknya menggunakan NPWP Bendahara Desa.
- b. Batas waktu penyetoran PPN dan PPh Pasal 22 adalah paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pembayaran. Surat Setoran Pajak menggunakan NPWP penyedia barang/jasa apabila PKP. Apabila penyedia barang/jasa bukan PKP ataupun tidak menunjukkan NPWP, setoran pajaknya menggunakan NPWP Bendahara Desa.
- c. Keterlambatan penyetoran pajak, Bendahara Desa dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) per-bulan, yang akan ditagih oleh KPP menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP).

4. Tata Cara Pelaporan Pajak.

Bendahara Desa diwajibkan untuk melakukan pelaporan SPT Masa pada setiap bulannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atas pajak-pajak yang sudah disetorkan ke Kas Negara, dengan ketentuan:

- a) Batas waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21, SPT Masa PPh Pasal 22, SPT Masa PPh Pasal 23 dan SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2) adalah tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
- b) Batas waktu pelaporan SPT Masa PPN adalah akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
- c) Apabila tidak lapor atau terlambat melaporkan SPT Masa setiap bulannya, Bendahara Desa dapat dikenakan denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap SPT Masa Pajak

Penghasilan dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap SPT Masa PPN, yang akan ditagih oleh KPP menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP).

5. Kegiatan penyediaan makan dan minuman dikenakan Pajak Daerah sebesar 10% (sepuluh perseratus) dan dibayarkan melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan.
6. Pengenaan bea meterai pada pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai. Bea meterai dalam pengelolaan keuangan Desa, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang memuat jumlah uang, ketentuannya adalah:
 - 1) transaksi sampai dengan nilai nominal Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tidak dikenakan bea meterai;
 - 2) transaksi dengan nilai nominal lebih dari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dikenakan bea meterai sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah); dan
 - 3) transaksi dengan nilai nominal lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikenakan bea meterai sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).
 - b. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata maka dikenakan bea meterai sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).
7. Penatausahaan.
 - a. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
 - b. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
 - c. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
 - d. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
 - e. Pengenaan pajak pada pelaksanaan kegiatan ADD:
 - 1) Pembelian/pengadaan barang yang bernilai minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hanya dikenakan PPN sebesar 10% (sepuluh perseratus). Sedang untuk pengadaan barang minimal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dikenai PPN sebesar 10% (sepuluh perseratus) dan PPh Pasal 22 sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus), bagi penyedia barang yang tidak memiliki NPWP dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 3% (tiga perseratus) dengan cara penghitungan sebagai berikut:

- a) $PPN = (100/110 \times \text{Nilai Nominal}) \times 10\%$ (PKP)
- b) $10\% \times \text{Nominal}$ (Non PKP)
- c) PPh Pasal 22 (ber NPWP) = $(100/110 \times \text{Nilai Nominal}) \times 1,5\%$ (PKP) $1,5\% \times \text{Nominal}$ (Non PKP)
- d) PPhPasal 22 (tidak ber NPWP) = $(100/110 \times \text{Nilai Nominal}) \times 3\%$ (PKP) $3\% \times \text{Nominal}$ (Non PKP)

Untuk pembayaran pajak menginduk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penyedia barang/toko/Bendahara Desa.

- 2) Pengenaan pajak berupa honorarium, uang lembur dikenakan pemotongan PPhPsl. 21 sebesar 5% (lima perseratus) bagi yang memiliki NPWP, sedangkan yang tidak memiliki NPWP dikenakan PPhPsl. 21 sebesar 6% (enam perseratus), untuk pembayaran pajak menginduk pada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa;
 - 3) Pengenaan pajak jasa dan sewa perlengkapan/peralatan dikenakan PPh pasal 23:
 - a) Sebesar 2% (dua perseratus) dari transaksi bagi yang memiliki NPWP dan yang tidak memiliki NPWP dikenakan PPh sebesar 4% (empat perseratus);
 - b) Rp1.000.000,00 keatas dikenakan PPhn 10% (sepuluh perseratus) dan PPh sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c) Pajak dibayar paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah transaksi; dan
 - d) Bendahara wajib melaporkan pajak-pajak yang telah dibayar kepada Kantor Pelayanan Pajak.
 - 4) Kegiatan penyediaan makan dan minuman dikenakan pajak daerah sebesar 10% (sepuluh perseratus) dan dibayarkan melalui BPKD Kabupaten Pekalongan.
8. Pengenaan bea meterai pada pelaksanaan kegiatan ADD.
- Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarannya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai. Ketentuan bea meterai dalam pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:
- a. Transaksi sampai dengan nilai nominal Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tidak dikenakan bea meterai;
 - b. Transaksi dengan nilai nominal lebih dari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dikenakan bea meterai sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah); dan
 - c. Transaksi dengan nilai nominal lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikenakan bea meterai sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).

E. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN.

1. Laporan SPJ dibuat oleh Kepala Desa mengacu pada format Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dengan pedoman pada ketentuan yang berlaku disampaikan kepada Camat selaku Ketua Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan. SPJ dibuat sekurang-kurangnya 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan SPJ asli disimpan di Desa, dan salinan SPJ diserahkan ke Camat;
2. Camat melakukan penelitian SPJ yang diterima dari Desa sebagaimana point 1;
3. Apabila dari hasil penelitian SPJ ditemukan ada kekurangan lampiran atau bukti pengeluaran keuangan maka Kepala Desa wajib untuk melengkapi kekurangannya, dan apabila ditemukan SPJ tidak sesuai antara rencana penggunaan dengan realisasinya, maka Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa Tingkat Kecamatan mengadakan klarifikasi langsung ke Desa paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah SPJ diterima;
4. Apabila hasil klarifikasi langsung ke Desa ditemukan adanya penyimpangan, maka Camat mengembalikan SPJ kepada Kepala Desa untuk dilakukan perbaikan;
5. Camat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD (tanpa dokumen SPJ) kepada Bupati cq. Kepala Dinas PMD, P3A dan PPKB paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada point 1.

F. PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA.

1. Pengawasan pelaksanaan ADD dilakukan oleh:
 - a. Pengawasan oleh masyarakat Desa yang bersangkutan secara umum berupa kritik dan saran yang bersifat membangun; dan
 - b. Pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten.
2. Dalam hal terjadi persoalan/permasalahan pelaksanaan kegiatan ADD, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. PENUTUP.

Demikian Pedoman Teknis Pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2020, guna menjadi pedoman dan acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan ADD di Kabupaten Pekalongan.

II. CONTOH FORMAT DOKUMEN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA.

A. FORMAT PERMOHONAN PENYALURAN ADD.

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN
PEMERINTAH DESA
Jln. Telp. Kode Pos

Nomor :
Lamp. :
Perihal : Permohonan Penyaluran
ADD Tahap TA 20xx

....., 20xx
Kepada:
Yth. Bupati Pekalongan
cq. Kepala Dinas PMD, P3A DAN
PPKB
Lewat CAMAT

Di
TEMPAT

Berdasarkan Peraturan Desa Nomor ... Tahun ... tentang APBDes Tahun 20..., yang didalamnya memuat kegiatan bersumber dari ADD sebesar Rp..... (.....), meliputi :

1. Tahap I, sebesar 25% : Rp.....
2. Tahap II, sebesar 25% : Rp.
3. Tahap III, sebesar 25% : Rp.
4. Tahap IV, sebesar 25% : Rp.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengajukan permohonan untuk Penyaluran ADD Tahap ... sebesar Rp..... (.....), untuk ditransfer ke:

Bank :
Nomr Rekening :
Atas Nama : Pemerintah Desa

Bersama ini kami lampirkan persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1.
2.
3. Dst.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Kepala Desa
Kecamatan

Cap + Ttd

.....

B. FORMAT REKOMENDASI PENYALURAN ADD.

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN
Jln. Telp. Kode Pos

REKOMENDASI

Nomor :

TENTANG
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHAP ...
TAHUN ANGGARAN 20xx

- a. Berdasarkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penyaluran Serta Pengelolaan ADD Tahun Anggaran 2020.
- b. Sesuai surat permohonan Penyaluran ADD dari Kepala Desa..... Kecamatan Nomor Tanggal, dengan melampirkan persyaratan dan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
 1.;
 2.;
 3. Dst... (sesuai tahapan)
 4. SPJ Tahap sudah diterima Kecamatan pada tanggal
- c. Untuk selanjutnya kami merekomendasikan penyaluran ADD tahap .. (...) Tahun Anggaran 20xx untuk Desa Kecamatan sebesar Rp..... (.....)

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

....., 20xx
Camat

.....
NIP.

C. FORMAT REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN ADD.

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI
 PELAKSANAAN KEGIATAN ADD TAHUN ANGGARAN 20xx
 KECAMATAN
 KABUPATEN PEKALONGAN
 TAHAP

No.	DESA	ANGGARAN	BID. I (Rp.)	BID. II (Rp.)	BID. III (Rp.)	BID. IV (Rp.)	BID.V (Rp.)	TOTAL (Rp.)	SISA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+5+6+7+8	10=3-9	11
1.										
2.										
3.										
4.										
Dst.										

....., 20xx
 Camat

.....
 NIP.

III. RINCIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

NO	KECAMATAN/DESA	RINCIAN ADD PER DESA	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
I. KANDANG SERANG						
1	Klesem	541,589,000	135,397,250	135,397,250	135,397,250	135,397,250
2	Bodas	521,985,000	130,496,250	130,496,250	130,496,250	130,496,250
3	Gembong	574,363,000	143,590,750	143,590,750	143,590,750	143,590,750
4	Sukoharjo	535,485,000	133,871,250	133,871,250	133,871,250	133,871,250
5	Garungwiyoro	544,692,000	136,173,000	136,173,000	136,173,000	136,173,000
6	Bubak	425,490,000	106,372,500	106,372,500	106,372,500	106,372,500
7	Bojongkoneng	446,885,000	111,721,250	111,721,250	111,721,250	111,721,250
8	Luragung	526,279,000	131,569,750	131,569,750	131,569,750	131,569,750
9	Kandangserang	328,034,000	82,008,500	82,008,500	82,008,500	82,008,500
10	Wangkelang	493,055,000	123,263,750	123,263,750	123,263,750	123,263,750
11	Lambur	424,660,000	106,165,000	106,165,000	106,165,000	106,165,000
12	Tajur	446,630,000	111,657,500	111,657,500	111,657,500	111,657,500
13	Trajumas	573,757,000	143,439,250	143,439,250	143,439,250	143,439,250
14	Karanggondang	444,108,000	111,027,000	111,027,000	111,027,000	111,027,000
II. PANINGGARAN						
1	Werdi	548,211,000	137,052,750	137,052,750	137,052,750	137,052,750
2	Winduaji	471,160,000	117,790,000	117,790,000	117,790,000	117,790,000
3	Krandegan	400,169,000	100,042,250	100,042,250	100,042,250	100,042,250
4	Lumeneng	624,325,000	156,081,250	156,081,250	156,081,250	156,081,250
5	Tanggeran	485,387,000	121,346,750	121,346,750	121,346,750	121,346,750
6	Kaliboja	493,042,000	123,260,500	123,260,500	123,260,500	123,260,500
7	Kaliombo	392,221,000	98,055,250	98,055,250	98,055,250	98,055,250
8	Botosari	503,820,000	125,955,000	125,955,000	125,955,000	125,955,000
9	Sawangan	451,639,000	112,909,750	112,909,750	112,909,750	112,909,750
10	Paninggaran	515,766,000	128,941,500	128,941,500	128,941,500	128,941,500
11	Domiyang	576,850,000	144,212,500	144,212,500	144,212,500	144,212,500
12	Notogiwang	546,413,000	136,603,250	136,603,250	136,603,250	136,603,250
13	Lambanggelun	600,145,000	150,036,250	150,036,250	150,036,250	150,036,250
14	Tenogo	456,207,000	114,051,750	114,051,750	114,051,750	114,051,750
15	Bedagung	453,671,000	113,417,750	113,417,750	113,417,750	113,417,750
III. LEBAKBARANG						
1	Tembelangunung	391,867,000	97,966,750	97,966,750	97,966,750	97,966,750
2	Pamutuh	408,088,000	102,022,000	102,022,000	102,022,000	102,022,000
3	Depok	308,165,000	77,041,250	77,041,250	77,041,250	77,041,250
4	Wonosido	337,859,000	84,464,750	84,464,750	84,464,750	84,464,750
5	Timbangsari	336,942,000	84,235,500	84,235,500	84,235,500	84,235,500
6	Sidomulyo	424,912,000	106,228,000	106,228,000	106,228,000	106,228,000
7	Kutorembet	378,469,000	94,617,250	94,617,250	94,617,250	94,617,250
8	Lebakbarang	491,334,000	122,833,500	122,833,500	122,833,500	122,833,500
9	Kapundutan	340,133,000	85,033,250	85,033,250	85,033,250	85,033,250
10	Bantar Kulon	310,020,000	77,505,000	77,505,000	77,505,000	77,505,000
11	Mendolo	453,671,000	113,417,750	113,417,750	113,417,750	113,417,750

NO	KECAMATAN/DESA	RINCIAN ADD PER DESA	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
IV. PETUNGKRIYONO						
1	Simego	440,484,000	110,121,000	110,121,000	110,121,000	110,121,000
2	Songgodadi	422,166,000	105,541,500	105,541,500	105,541,500	105,541,500
3	Curugmuncar	384,430,000	96,107,500	96,107,500	96,107,500	96,107,500
4	Gumelem	298,262,000	74,565,500	74,565,500	74,565,500	74,565,500
5	Tlogohendro	519,285,000	129,821,250	129,821,250	129,821,250	129,821,250
6	Yosorejo	433,235,000	108,308,750	108,308,750	108,308,750	108,308,750
7	Tlogopakis	533,716,000	133,429,000	133,429,000	133,429,000	133,429,000
8	Kasimpar	391,462,000	97,865,500	97,865,500	97,865,500	97,865,500
9	Kayupuring	434,697,000	108,674,250	108,674,250	108,674,250	108,674,250
V. TALUN						
1	Mesoyi	419,994,000	104,998,500	104,998,500	104,998,500	104,998,500
2	Jolotigo	448,878,000	112,219,500	112,219,500	112,219,500	112,219,500
3	Sengare	542,860,000	135,715,000	135,715,000	135,715,000	135,715,000
4	Donowangun	465,758,000	116,439,500	116,439,500	116,439,500	116,439,500
5	Talun	354,884,000	88,721,000	88,721,000	88,721,000	88,721,000
6	Banjarsari	380,753,000	95,188,250	95,188,250	95,188,250	95,188,250
7	Kalirejo	385,080,000	96,270,000	96,270,000	96,270,000	96,270,000
8	Batursari	337,756,000	84,439,000	84,439,000	84,439,000	84,439,000
9	Karangasem	408,665,000	102,166,250	102,166,250	102,166,250	102,166,250
10	Krompeng	393,194,000	98,298,500	98,298,500	98,298,500	98,298,500
VI. DORO						
1	Pungangan	369,468,000	92,367,000	92,367,000	92,367,000	92,367,000
2	Sidoharjo	396,972,000	99,243,000	99,243,000	99,243,000	99,243,000
3	Lemahabang	446,159,000	111,539,750	111,539,750	111,539,750	111,539,750
4	Rogoselo	412,242,000	103,060,500	103,060,500	103,060,500	103,060,500
5	Harjosari	405,789,000	101,447,250	101,447,250	101,447,250	101,447,250
6	Larikan	368,280,000	92,070,000	92,070,000	92,070,000	92,070,000
7	Sawangan	409,854,000	102,463,500	102,463,500	102,463,500	102,463,500
8	Dororejo	384,678,000	96,169,500	96,169,500	96,169,500	96,169,500
9	Doro	459,509,000	114,877,250	114,877,250	114,877,250	114,877,250
10	Randusari	364,580,000	91,145,000	91,145,000	91,145,000	91,145,000
11	Kutosari	390,000,000	97,500,000	97,500,000	97,500,000	97,500,000
12	Wringinagung	393,062,000	98,265,500	98,265,500	98,265,500	98,265,500
13	Kalimojosari	424,821,000	106,205,250	106,205,250	106,205,250	106,205,250
14	Bligorejo	453,671,000	113,417,750	113,417,750	113,417,750	113,417,750
VII. KARANGANYAR						
1	Gutomo	411,620,000	102,905,000	102,905,000	102,905,000	102,905,000
2	Limbangan	380,151,000	95,037,750	95,037,750	95,037,750	95,037,750
3	Karanggondang	363,808,000	90,952,000	90,952,000	90,952,000	90,952,000
4	Lolong	316,426,000	79,106,500	79,106,500	79,106,500	79,106,500
5	Pedawang	444,126,000	111,031,500	111,031,500	111,031,500	111,031,500
6	Pododadi	434,876,000	108,719,000	108,719,000	108,719,000	108,719,000
7	Legokalong	459,788,000	114,947,000	114,947,000	114,947,000	114,947,000
8	Karangsari	444,434,000	111,108,500	111,108,500	111,108,500	111,108,500
9	Kulu	435,226,000	108,806,500	108,806,500	108,806,500	108,806,500
10	Banjarejo	377,616,000	94,404,000	94,404,000	94,404,000	94,404,000

NO	KECAMATAN/DESA	RINCIAN ADD PER DESA	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
11	Wonosari	433,672,000	108,418,000	108,418,000	108,418,000	108,418,000
12	Sokosari	412,584,000	103,146,000	103,146,000	103,146,000	103,146,000
13	Sidomukti	401,523,000	100,380,750	100,380,750	100,380,750	100,380,750
14	Kayugeritan	489,414,000	122,353,500	122,353,500	122,353,500	122,353,500
15	Kutosari	332,777,000	83,194,250	83,194,250	83,194,250	83,194,250
VIII. KAJEN						
1	Tambakroto	453,671,000	113,417,750	113,417,750	113,417,750	113,417,750
2	Kutorojo	455,058,000	113,764,500	113,764,500	113,764,500	113,764,500
3	Linggoasri	422,166,000	105,541,500	105,541,500	105,541,500	105,541,500
4	Brengkolang	362,460,000	90,615,000	90,615,000	90,615,000	90,615,000
5	Pringsurat	333,398,000	83,349,500	83,349,500	83,349,500	83,349,500
6	Sokoyoso	422,166,000	105,541,500	105,541,500	105,541,500	105,541,500
7	Sinangohprendeng	373,574,000	93,393,500	93,393,500	93,393,500	93,393,500
8	Kajongan	338,502,000	84,625,500	84,625,500	84,625,500	84,625,500
9	Pekiringanageng	365,957,000	91,489,250	91,489,250	91,489,250	91,489,250
10	Gandarum	510,539,000	127,634,750	127,634,750	127,634,750	127,634,750
11	Sabarwangi	351,164,000	87,791,000	87,791,000	87,791,000	87,791,000
12	Kalijoyo	438,692,000	109,673,000	109,673,000	109,673,000	109,673,000
13	Wonorejo	364,414,000	91,103,500	91,103,500	91,103,500	91,103,500
14	Pekiringanalit	465,982,000	116,495,500	116,495,500	116,495,500	116,495,500
15	Kutorejo	359,481,000	89,870,250	89,870,250	89,870,250	89,870,250
16	Nyamok	429,292,000	107,323,000	107,323,000	107,323,000	107,323,000
17	Tanjungkulon	340,794,000	85,198,500	85,198,500	85,198,500	85,198,500
18	Tanjungsari	407,166,000	101,791,500	101,791,500	101,791,500	101,791,500
19	Gejlig	519,747,000	129,936,750	129,936,750	129,936,750	129,936,750
20	Kebonagung	508,021,000	127,005,250	127,005,250	127,005,250	127,005,250
21	Sangkanjoyo	422,166,000	105,541,500	105,541,500	105,541,500	105,541,500
22	Salit	492,056,000	123,014,000	123,014,000	123,014,000	123,014,000
23	Sambiroto	487,465,000	121,866,250	121,866,250	121,866,250	121,866,250
24	Rowolaku	391,785,000	97,946,250	97,946,250	97,946,250	97,946,250
IX. KESESI						
1	Windurojo	510,564,000	127,641,000	127,641,000	127,641,000	127,641,000
2	Ujungnegoro	414,958,000	103,739,500	103,739,500	103,739,500	103,739,500
3	Brondong	376,832,000	94,208,000	94,208,000	94,208,000	94,208,000
4	Podosari	400,569,000	100,142,250	100,142,250	100,142,250	100,142,250
5	Kwasen	423,467,000	105,866,750	105,866,750	105,866,750	105,866,750
6	Langensari	422,166,000	105,541,500	105,541,500	105,541,500	105,541,500
7	Jagung	384,217,000	96,054,250	96,054,250	96,054,250	96,054,250
8	Watugajah	335,193,000	83,798,250	83,798,250	83,798,250	83,798,250
9	Karangrejo	360,528,000	90,132,000	90,132,000	90,132,000	90,132,000
10	Karyomukti	316,372,000	79,093,000	79,093,000	79,093,000	79,093,000
11	Kesesi	496,562,000	124,140,500	124,140,500	124,140,500	124,140,500
12	Srinahan	352,917,000	88,229,250	88,229,250	88,229,250	88,229,250
13	Kaibahan	372,389,000	93,097,250	93,097,250	93,097,250	93,097,250
14	Watupayung	336,026,000	84,006,500	84,006,500	84,006,500	84,006,500
15	Krandon	414,697,000	103,674,250	103,674,250	103,674,250	103,674,250
16	Ponolawen	373,350,000	93,337,500	93,337,500	93,337,500	93,337,500

NO	KECAMATAN/DESA	RINCIAN ADD PER DESA	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
17	Kalimade	406,140,000	101,535,000	101,535,000	101,535,000	101,535,000
18	Sidomulyo	390,661,000	97,665,250	97,665,250	97,665,250	97,665,250
19	Sukorejo	406,181,000	101,545,250	101,545,250	101,545,250	101,545,250
20	Sidosari	422,166,000	105,541,500	105,541,500	105,541,500	105,541,500
21	Mulyorejo	353,008,000	88,252,000	88,252,000	88,252,000	88,252,000
22	Pantirejo	407,534,000	101,883,500	101,883,500	101,883,500	101,883,500
23	Kwiganan	403,016,000	100,754,000	100,754,000	100,754,000	100,754,000
X. SRAGI						
1	Ketanonageng	337,440,000	84,360,000	84,360,000	84,360,000	84,360,000
2	Mrican	325,315,000	81,328,750	81,328,750	81,328,750	81,328,750
3	Bulaksari	505,755,000	126,438,750	126,438,750	126,438,750	126,438,750
4	Sumublor	480,320,000	120,080,000	120,080,000	120,080,000	120,080,000
5	Sumubkidul	399,423,000	99,855,750	99,855,750	99,855,750	99,855,750
6	Kalijambe	511,478,000	127,869,500	127,869,500	127,869,500	127,869,500
7	Purworejo	437,181,000	109,295,250	109,295,250	109,295,250	109,295,250
8	Kedungjaran	440,330,000	110,082,500	110,082,500	110,082,500	110,082,500
9	Klunjukan	364,156,000	91,039,000	91,039,000	91,039,000	91,039,000
10	Gebangkerep	612,810,000	153,202,500	153,202,500	153,202,500	153,202,500
11	Purwodadi	376,194,000	94,048,500	94,048,500	94,048,500	94,048,500
12	Bulakpelem	526,130,000	131,532,500	131,532,500	131,532,500	131,532,500
13	Tegalsuruh	406,262,000	101,565,500	101,565,500	101,565,500	101,565,500
14	Krasakageng	477,722,000	119,430,500	119,430,500	119,430,500	119,430,500
15	Sijeruk	375,838,000	93,959,500	93,959,500	93,959,500	93,959,500
16	Tegalontar	422,166,000	105,541,500	105,541,500	105,541,500	105,541,500
XI. BOJONG						
1	Bukur	422,166,000	105,541,500	105,541,500	105,541,500	105,541,500
2	Kalipancur	532,768,000	133,192,000	133,192,000	133,192,000	133,192,000
3	Sumurjomblangbogo	477,543,000	119,385,750	119,385,750	119,385,750	119,385,750
4	Pantianom	428,982,000	107,245,500	107,245,500	107,245,500	107,245,500
5	Randumuktiwaren	475,920,000	118,980,000	118,980,000	118,980,000	118,980,000
6	Legokcile	350,870,000	87,717,500	87,717,500	87,717,500	87,717,500
7	Bojongwetan	375,391,000	93,847,750	93,847,750	93,847,750	93,847,750
8	Wangandowo	459,393,000	114,848,250	114,848,250	114,848,250	114,848,250
9	Duwet	347,239,000	86,809,750	86,809,750	86,809,750	86,809,750
10	Ketitangkidul	327,651,000	81,912,750	81,912,750	81,912,750	81,912,750
11	Menjangan	437,689,000	109,422,250	109,422,250	109,422,250	109,422,250
12	Ketitanglor	309,582,000	77,395,500	77,395,500	77,395,500	77,395,500
13	Rejosari	327,651,000	81,912,750	81,912,750	81,912,750	81,912,750
14	Bojonglor	416,982,000	104,245,500	104,245,500	104,245,500	104,245,500
15	Bojongminggir	379,013,000	94,753,250	94,753,250	94,753,250	94,753,250
16	Wiroditan	359,762,000	89,940,500	89,940,500	89,940,500	89,940,500
17	Kemasan	360,625,000	90,156,250	90,156,250	90,156,250	90,156,250
18	Jajarwayang	382,987,000	95,746,750	95,746,750	95,746,750	95,746,750
19	Babalanlor	398,460,000	99,615,000	99,615,000	99,615,000	99,615,000
20	Babalankidul	355,527,000	88,881,750	88,881,750	88,881,750	88,881,750
21	Karangsari	323,503,000	80,875,750	80,875,750	80,875,750	80,875,750
22	Sembungjambu	447,434,000	111,858,500	111,858,500	111,858,500	111,858,500

NO	KECAMATAN/DESA	RINCIAN ADD PER DESA	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
XII. WONOPRINGGO						
1	Jetakkidul	393,971,000	98,492,750	98,492,750	98,492,750	98,492,750
2	Sastrodirjan	360,758,000	90,189,500	90,189,500	90,189,500	90,189,500
3	Legokgunung	387,990,000	96,997,500	96,997,500	96,997,500	96,997,500
4	Galangpengampon	453,671,000	113,417,750	113,417,750	113,417,750	113,417,750
5	Kwagean	350,756,000	87,689,000	87,689,000	87,689,000	87,689,000
6	Getas	354,047,000	88,511,750	88,511,750	88,511,750	88,511,750
7	Rowokembu	438,341,000	109,585,250	109,585,250	109,585,250	109,585,250
8	Wonopringgo	320,600,000	80,150,000	80,150,000	80,150,000	80,150,000
9	Sampih	303,273,000	75,818,250	75,818,250	75,818,250	75,818,250
10	Gondang	323,857,000	80,964,250	80,964,250	80,964,250	80,964,250
11	Wonorejo	374,727,000	93,681,750	93,681,750	93,681,750	93,681,750
12	Jetaklengkong	296,146,000	74,036,500	74,036,500	74,036,500	74,036,500
13	Pegadentengah	324,979,000	81,244,750	81,244,750	81,244,750	81,244,750
14	Surobayan	296,146,000	74,036,500	74,036,500	74,036,500	74,036,500
XIII. KEDUNGWUNI						
1	Rowocacing	312,946,000	78,236,500	78,236,500	78,236,500	78,236,500
2	Langkap	376,070,000	94,017,500	94,017,500	94,017,500	94,017,500
3	Pajomblangan	317,466,000	79,366,500	79,366,500	79,366,500	79,366,500
4	Tosaran	373,972,000	93,493,000	93,493,000	93,493,000	93,493,000
5	Pakisputih	342,905,000	85,726,250	85,726,250	85,726,250	85,726,250
6	Kedungpatangewu	344,815,000	86,203,750	86,203,750	86,203,750	86,203,750
7	Podo	383,056,000	95,764,000	95,764,000	95,764,000	95,764,000
8	Kwayangan	326,073,000	81,518,250	81,518,250	81,518,250	81,518,250
9	Proto	357,626,000	89,406,500	89,406,500	89,406,500	89,406,500
10	Salakbrojo	423,425,000	105,856,250	105,856,250	105,856,250	105,856,250
11	Ambokembang	433,706,000	108,426,500	108,426,500	108,426,500	108,426,500
12	Tangkiltengah	384,738,000	96,184,500	96,184,500	96,184,500	96,184,500
13	Tangkilkulon	376,066,000	94,016,500	94,016,500	94,016,500	94,016,500
14	Karangdowo	407,370,000	101,842,500	101,842,500	101,842,500	101,842,500
15	Bugangan	328,423,000	82,105,750	82,105,750	82,105,750	82,105,750
16	Rengas	390,858,000	97,714,500	97,714,500	97,714,500	97,714,500
XIV. BUARAN						
1	Coprayan	328,797,000	82,199,250	82,199,250	82,199,250	82,199,250
2	Wonoyoso	319,186,000	79,796,500	79,796,500	79,796,500	79,796,500
3	Pakumbulan	373,549,000	93,387,250	93,387,250	93,387,250	93,387,250
4	Watusalam	341,254,000	85,313,500	85,313,500	85,313,500	85,313,500
5	Simbangwetan	325,440,000	81,360,000	81,360,000	81,360,000	81,360,000
6	Kertijayan	375,824,000	93,956,000	93,956,000	93,956,000	93,956,000
7	Paweden	352,798,000	88,199,500	88,199,500	88,199,500	88,199,500
XV. TIRTO						
1	Wuled	341,180,000	85,295,000	85,295,000	85,295,000	85,295,000
2	Ngalian	319,858,000	79,964,500	79,964,500	79,964,500	79,964,500
3	Pandanarum	358,502,000	89,625,500	89,625,500	89,625,500	89,625,500
4	Karanganyar	347,911,000	86,977,750	86,977,750	86,977,750	86,977,750
5	Silirejo	407,173,000	101,793,250	101,793,250	101,793,250	101,793,250
6	Pucung	330,968,000	82,742,000	82,742,000	82,742,000	82,742,000

NO	KECAMATAN/DESA	RINCIAN ADD PER DESA	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
7	Dadirejo	474,528,000	118,632,000	118,632,000	118,632,000	118,632,000
8	Sidorejo	405,011,000	101,252,750	101,252,750	101,252,750	101,252,750
9	Curug	345,263,000	86,315,750	86,315,750	86,315,750	86,315,750
10	Tanjung	300,509,000	75,127,250	75,127,250	75,127,250	75,127,250
11	Samborejo	423,998,000	105,999,500	105,999,500	105,999,500	105,999,500
12	Pacar	351,603,000	87,900,750	87,900,750	87,900,750	87,900,750
13	Karangjampo	391,332,000	97,833,000	97,833,000	97,833,000	97,833,000
14	Tegaldowo	388,797,000	97,199,250	97,199,250	97,199,250	97,199,250
15	Mulyorejo	356,073,000	89,018,250	89,018,250	89,018,250	89,018,250
16	Jeruksari	418,615,000	104,653,750	104,653,750	104,653,750	104,653,750
XVI. WIRADESA						
1	Kadipaten	351,433,000	87,858,250	87,858,250	87,858,250	87,858,250
2	Delegtukang	302,964,000	75,741,000	75,741,000	75,741,000	75,741,000
3	Karangjati	316,156,000	79,039,000	79,039,000	79,039,000	79,039,000
4	Petukangan	314,480,000	78,620,000	78,620,000	78,620,000	78,620,000
5	Wiradesa	451,936,000	112,984,000	112,984,000	112,984,000	112,984,000
6	Warukidul	344,284,000	86,071,000	86,071,000	86,071,000	86,071,000
7	Bondansari	422,464,000	105,616,000	105,616,000	105,616,000	105,616,000
8	Warulor	327,651,000	81,912,750	81,912,750	81,912,750	81,912,750
9	Kampil	382,184,000	95,546,000	95,546,000	95,546,000	95,546,000
10	Kemplong	314,911,000	78,727,750	78,727,750	78,727,750	78,727,750
11	Kauman	318,290,000	79,572,500	79,572,500	79,572,500	79,572,500
XVII. SIWALAN						
1	Mejasem	326,144,000	81,536,000	81,536,000	81,536,000	81,536,000
2	Wonosari	350,421,000	87,605,250	87,605,250	87,605,250	87,605,250
3	Tengengewetan	612,598,000	153,149,500	153,149,500	153,149,500	153,149,500
4	Tunjungsari	390,661,000	97,665,250	97,665,250	97,665,250	97,665,250
5	Blimbingwuluh	436,067,000	109,016,750	109,016,750	109,016,750	109,016,750
6	Pait	603,687,000	150,921,750	150,921,750	150,921,750	150,921,750
7	Tengengkulon	385,352,000	96,338,000	96,338,000	96,338,000	96,338,000
8	Rembun	478,250,000	119,562,500	119,562,500	119,562,500	119,562,500
9	Yosorejo	415,425,000	103,856,250	103,856,250	103,856,250	103,856,250
10	Siwalan	507,522,000	126,880,500	126,880,500	126,880,500	126,880,500
11	Boyoteluk	421,294,000	105,323,500	105,323,500	105,323,500	105,323,500
12	Depok	359,156,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000	89,789,000
13	Blacanan	393,757,000	98,439,250	98,439,250	98,439,250	98,439,250
XVIII. KARANGDADAP						
1	Logandeng	355,804,000	88,951,000	88,951,000	88,951,000	88,951,000
2	Jrebengkembang	491,089,000	122,772,250	122,772,250	122,772,250	122,772,250
3	Pagumenganmas	502,358,000	125,589,500	125,589,500	125,589,500	125,589,500
4	Kedungkebo	443,742,000	110,935,500	110,935,500	110,935,500	110,935,500
5	Kaligawe	392,589,000	98,147,250	98,147,250	98,147,250	98,147,250
6	Karangdadap	457,102,000	114,275,500	114,275,500	114,275,500	114,275,500
7	Kalilembu	385,005,000	96,251,250	96,251,250	96,251,250	96,251,250
8	Pangkah	339,091,000	84,772,750	84,772,750	84,772,750	84,772,750
9	Kebonrowopucang	523,233,000	130,808,250	130,808,250	130,808,250	130,808,250
10	Kebonsari	512,618,000	128,154,500	128,154,500	128,154,500	128,154,500

NO	KECAMATAN/DESA	RINCIAN ADD PER DESA	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
11	Pegandon	442,505,000	110,626,250	110,626,250	110,626,250	110,626,250
XIX. WONOKERTO						
1	Werdi	387,381,000	96,845,250	96,845,250	96,845,250	96,845,250
2	Rowoyoso	393,446,000	98,361,500	98,361,500	98,361,500	98,361,500
3	Bebel	411,548,000	102,887,000	102,887,000	102,887,000	102,887,000
4	Wonokertowetan	324,802,000	81,200,500	81,200,500	81,200,500	81,200,500
5	Sijambe	343,017,000	85,754,250	85,754,250	85,754,250	85,754,250
6	Pesanggrahan	322,622,000	80,655,500	80,655,500	80,655,500	80,655,500
7	Pecakaran	349,826,000	87,456,500	87,456,500	87,456,500	87,456,500
8	Api-api	389,992,000	97,498,000	97,498,000	97,498,000	97,498,000
9	Wonokertokulon	362,359,000	90,589,750	90,589,750	90,589,750	90,589,750
10	Tratebang	332,524,000	83,131,000	83,131,000	83,131,000	83,131,000
11	Semut	383,867,000	95,966,750	95,966,750	95,966,750	95,966,750
JUMLAH TOTAL		110,741,623,000	27,685,405,750	27,685,405,750	27,685,405,750	27,685,405,750

BUPATI PEKALONGAN,
ttd
ASIP KHOLBIHI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

MOCH. ARIFIN, SH.,MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690205 199903 1 005